

BAB IV

Peran OKI Dalam Menangani Konflik Moro

A. OKI Sebagai Global Governance Dalam Konflik Moro

Menurut Rosenau Global Governance adalah sebuah gerakan yang berusaha mengintegritaskan para aktor transnasional dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. (Rosenau, 1992). Munculnya konsep global governance dalam diskursus hubungan internasional merupakan respons dari semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia serta menguatnya aktor-aktor baru (non-state) yang menawarkan peran yang lebih beragam. Terkait persoalan dan ancaman yang menghadapi umat manusia dalam dunia internasional, setidaknya terdapat dua aspek yang menjadi kepedulian global governance, yakni persoalan keamanan dan persoalan ekonomi. Disini OKI hadir sebagai Global Governance yang mana dalam konteks ini OKI hadir menjadi pihak non-state yang terlibat di dalam konflik antara pemerintah Filipina dan suku Moro, disini OKI muncul sebagai tata kelola global yang menaungi negara-negara Islam dan juga fokus pada masalah-masalah yang terjadi pada dunia Islam untuk memberikan solusi untuk menangani masalah yang sedang terjadi.

Tahun 1970-an merupakan periode paling kejam dalam perjuangan MNLF untuk Republik Bangsamoro dan konflik paling berdarah di wilayah Filipina sejak Perang Dunia II. Dalam empat tahun pertama sejak Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan darurat militer pada

tahun 1972, ada 120.000 korban sipil dan militer. Selama periode yang sama, 100.000 Muslim melarikan diri dari wilayah Mindanao yang dilanda konflik untuk mencari perlindungan di negara tetangga Malaysia dan satu juta orang mengungsi secara internal. Pada tahun 1975, konflik antara pemerintah Filipina dan MNLF telah mencapai jalan buntu.

Dan kejadian tersebut merupakan awal mula konflik ini menjadi sorotan dunia internasional, pada tahun 1975 OKI yang terbentuk atas dasar solidaritas muslim mengakui bahwa MNLF adalah satu-satunya representatif umat muslim sehingga OKI memutuskan status observasi. Dengan bantuan OKI dan pemerintah Malaysia (Founding Father dari OKI) pemerintah Filipina melakukan perundingan perdamaian untuk pertama kalinya pada tahun 1975 dan dilanjutkan perjanjian perdamaian di Tripoli, Libya pada tahun 1976.

Di sisi lain OKI disini muncul bukan karena hanya solidaritas sesama umat muslim melainkan konflik Mindanao juga diintervensi oleh pihak luar yang mencari kesempatan dalam konflik ini. Tindakan suku Moro dianggap oleh beberapa pihak di dunia Internasional sebagai separatisme Islam, seperti contohnya Amerika Serikat langsung mengintervensi konflik ini dengan berpihak pada Pemerintahan Filipina karena suku Moro sendiri dianggap sebagai separatisme. Diskursus separatisme dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep legitimasi atau kekuasaan terhadap pemerintah yang berkuasa. Pemikiran tersebut sudah lama dikembangkan oleh pemikir-pemikir Islam klasik seperti al-Ghazali, al-Mawardi, ataupun Ibn Taimiyah. (Surwandono & Ahmadi, 2011)

Pasca Final Peace Agreement tahun 1996 konflik di Moro terus mengalami dinamika dan tidak stabil. Dikarenakan gejolak Konflik yang tidak kunjung reda OKI menaruh perhatian khusus pada konflik ini bahkan menteri luar negeri OKI fokus penuh dengan selalu mengadakan Konferensi Para Menteri Luar Negeri (KTM). Pertemuan ini bertujuan untuk memeriksa dan menguji hasil-hasil yang telah dicapai dari implementasi atas kebijakan-kebijakan yang di ambil dari KTT sebelumnya.

Dalam kurun waktu 2015-2017 kementerian luar negeri OKI berupaya keras menemukan titik terang perdamaian kedua belah pihak. pada tahun 2015 Sekretaris Jenderal OKI Mengadakan Pertemuan Ekstensif dengan Pejabat Pemerintah Filipina dan Dua Front Moro yakni MNLF dan MILF. Sekretaris Jenderal OKI juga meninjau situasi proses perdamaian dengan Duta Negara Anggota OKI yang ditempatkan di Manila selama makan malam yang diselenggarakan oleh Duta Besar Arab Saudi pada saat itu, Dr. Abdullah Al-Bussairy. kunjungan pertama oleh Sekjen OKI ke wilayah tersebut, untuk bertemu dengan dua kelompok Muslim utama yang memimpin perjuangan untuk otonomi selama lima dekade terakhir, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). (oic-oci.org, 2015)

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa konflik di Moro sudah menjadi isu penting dalam dunia Islam pasca awal mula OKI teribat menjadi pihak ketiga di tahun 1976 yang menghasilkan tripoli agreement. Disini OKI sebagai Organisasi representatif umat muslim dunia dan memangku solidaritas beragama antar umat muslim terus berupaya penuh walaupun juga OKI sudah melakukan

berkali-kali perundingan perdamaian dalam konflik ini tidak lantas lepas tangan. Upaya final OKI sebagai global governance juga disini dilanjutkan dengan memfasilitasi sidang pada tahun 2017 sebagai mediator antara pihak pemerintah dan suku Moro itu sendiri.

B. Upaya OKI sebelum sidang di Abidjan, Pantai Gading (2015-2016)

Konflik Moro ini sudah berangsur sejak lama, pasca Final Peace Agreement tahun 1996 yang berhasil dibuat oleh OKI dan dengan bantuan dunia Internasional konflik ini masih berkepanjangan hingga tahun 2015. OKI sebagai organisasi yang menjaga perdamaian dunia dan juga menjaga solidaritas umat muslim terus memantau dan menjaga perdamaian di Filipina selatan, Melihat gejolak konflik yang terjadi di Filipina sebagai organisasi internasional yang pernah turun langsung di perundingan perdamaian sebelumnya tidak hanya bisa tinggal diam, OKI melakukan upaya-upaya menyelesaikan konflik salah satunya adalah pada tahun 2015 Sekretaris Jenderal OKI Mengadakan Pertemuan Ekstensif dengan Pejabat Pemerintah Filipina dan Dua Front Moro yakni MNLF dan MILF. Sekretaris Jenderal OKI juga meninjau situasi proses perdamaian dengan Duta Negara Anggota OKI yang ditempatkan di Manila selama makan malam yang diselenggarakan oleh Duta Besar Arab Saudi pada saat itu, Dr. Abdullah Al-Bussairy. kunjungan pertama oleh Sekjen OKI ke wilayah tersebut,

untuk bertemu dengan dua kelompok Muslim utama yang memimpin perjuangan untuk otonomi selama lima dekade terakhir, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Kunjungannya ke Mindanao sangat dihargai oleh dua kelompok yang datang dari berbagai daerah untuk bertemu dengannya. Sekretaris Jenderal bertemu dengan masing-masing kelompok secara terpisah pada hari Sabtu dan Minggu untuk membawa pandangan dan harapan dari kedua belah pihak lebih dekat. Sekretaris Jenderal menekankan pada kebutuhan untuk persatuan, kesepakatan dan pertimbangan peran dan pentingnya setiap kelompok untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran di wilayah tersebut. Madani kemudian memimpin pertemuan Forum Koordinasi Bangsamoro (BCF), yang diaktifkan tahun lalu dan bergabung dengan dua front Moro untuk bekerja sama. Kedua belah pihak sepakat bahwa Forum adalah mekanisme terbaik untuk diskusi dan pertukaran informasi, dan mereka setuju untuk terus mengerahkan upaya mereka untuk kepentingan proses perdamaian. (oic-oci.org, 2015)

Di hari selanjutnya sekjen OKI Iyad Ameen Madani mengadakan pertemuan dengan Presiden Filipina Benigno, Senin, 20 April 2015, di Istana Presiden di ibukota Manila. Guna membahas kelanjutan proses perdamaian di Filipina Selatan. Presiden menegaskan kembali komitmennya demi keberhasilan dan dukungannya terhadap Undang-Undang Dasar

Bangsamoro, yang menguraikan aturan otonomi di selatan. Sekretaris Jenderal OKI menekankan posisi OKI dalam mendukung proses perdamaian dan Forum Koordinasi Bangsamoro sebagai mekanisme untuk diskusi dan pertukaran informasi antara MNLF dan MILF, serta penghormatan penuh terhadap integritas teritorial dan juga kedaulatan dari Republik Filipina.

Upaya terus dilanjutkan OKI sebagai mediator dalam konflik ini tidak berhenti pada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh OKI terhadap pihak yang terlibat konflik, OKI melakukan upaya lanjutan dengan mengadakan sidang tripartit di Filipina. Sekjen OKI mengirimkan dutanya El-Masry, dimana Selama konsultasi informal, ketiga pihak menyetujui sebuah agenda draf termasuk penjelasan singkat oleh perwakilan pemerintah mengenai situasi saat ini mengenai RUU otonomi dan diskusi tentang masalah yang tertunda, termasuk konvergensi perjanjian sebelumnya dengan undang-undang otonomi. Proses Persiapan Perdamaian Tripartit berlangsung selama dua hari pada tanggal 7-8 September 2015 di Manila, Filipina antara Organisasi Kerjasama Islam, Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro menyimpulkan telah menyetujui agenda dan isu-isu substantif yang akan dibahas di depan Pertemuan Tingkat Menteri Tripartit yang akan diadakan di Jeddah pada bulan November 2015. OKI telah mempertahankan komitmennya terhadap Tinjauan Tripartit sejak dimulai pada tahun 2007 yang telah berpengaruh pada

pembentukan proses-proses penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bangsamoro. Selama rapat Tripartit berlangsung, partai-partai dapat mendiskusikan kembali diskusi tentang Dana Bantuan Pembangunan Bangsamoro yang membahas kebutuhan sosial-ekonomi Rakyat Bangsamoro, yang merupakan proses untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan yang dicapai selama peninjauan tripartit. Pertemuan itu juga diberi pengarahannya tentang status Dasar Hukum Bangsamoro saat ini dalam Kongres oleh perwakilan Pemerintah Filipina dan mengadakan diskusi mengenai mekanisme untuk membawa kedua jalur perdamaian bersama. Tujuan akhir dari pertemuan Tripartit adalah untuk menetapkan jalan bagi implementasi perjanjian perdamaian sebelumnya Perjanjian Damai Tripoli 1976 dan Final Peace Agreement 1996. Selama sidang Tripartit, para pihak menyepakati sejumlah masalah umum. Sehubungan dengan Dana Bantuan Pembangunan Bangsamoro, pertemuan tersebut setuju untuk meninjau kembali kesepakatan dan pemahaman tentang implementasi Dana Bantuan Pembangunan Bangsamoro. Para pihak juga setuju untuk menindaklanjuti dengan Bank Pembangunan Islam tentang Kerangka Acuan (TOR) dari Dana Bantuan Pembangunan Bangsamoro. Pertemuan tersebut juga menyetujui untuk meninjau kembali kesepakatan tentang Komite Pelaksanaan dan Pengawasan Tripartit (TIMC). Sesuai dengan Kerangka Acuan yang diusulkan, TIMC akan

bertemu dan memantau pelaksanaan semua perjanjian Proses Implementasi Tripartit., pertemuan sepakat untuk melihat Perjanjian Interim tentang Co-management yang ditandatangani dalam dokumen selama Pertemuan Tingkat Tinggi Ad Hoc pada tanggal 1-2 Maret 2012. Kedua pihak, (GPH dan MNLF) berkomitmen untuk bekerja dengan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) dan Daerah Otonom di Muslim Mindanao (ARMM) tentang status saat ini pengaturan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Interim dan menyerahkan rekomendasi tentang cara memperkuat yang sama. Pertemuan tersebut juga menyetujui untuk memeriksa ketentuan Dasar Hukum Bangsamoro yang relevan dengan pengelolaan bersama.

Selanjutnya pada tahun 2016 Utusan Khusus OKI dala, Proses Perdamaian di Filipina Selatan, Duta Besar Sayed Kassem Elmasry, didampingi oleh perwakilan dari Departemen Minoritas dan Komunitas Muslim, mengakhiri kunjungan resmi empat hari di Filipina. Tujuan dari misi ini adalah untuk terlibat dalam pembicaraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perdamaian untuk menindaklanjuti perkembangan terakhir di lapangan.

Delegasi OKI bertemu dengan Sekretaris presiden Filipina Jesus Dureza sekaligus penasihat Presiden pada proses perdamaian untuk menerima pengarahan mengenai rencana Pemerintah untuk

federalisme dan pemetaan baru guna menuju perdamaian. Pada pembukaan pertemuan, Sekretaris Dureza menguraikan rencana pemerintah untuk menyatukan elemen-elemen kunci dari semua perjanjian internasional sebelumnya menjadi satu undang-undang yang memungkinkan yang akan disahkan untuk kepentingan semua pihak. Dureza menekankan pentingnya peran lanjutan dari OKI sebagai mitra penting dalam proses perdamaian dan dia memuji pencapaian OKI, khususnya, pembentukan Forum Koordinasi Bangsamoro (BCF).

Delegasi OIC mencatat dukungan kuat untuk proses perdamaian dan memuji upaya Filipina untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi di Mindanao dengan bekerja untuk konvergensi dari dua jalur perdamaian. Dureza mencatat bahwa Filipina berdedikasi dan berkomitmen penuh untuk proses ini.

Delegasi OKI mengadakan pembicaraan terpisah dengan front Moro, yaitu Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) untuk memastikan pandangan mereka tentang proses perdamaian. Dan menegaskan kembali bahwa Bangsamoro Coordination Forum (BCF) adalah tempat utama bagi MNLF dan MILF untuk merapatkan barisan, memperkuat dan mengkonsolidasikan kerjasama dan persatuan mereka dan mempertahankan perjuangan damai mereka untuk tujuan bersama.

C. Upaya OKI menjadi mediator sidang perdamaian konflik Moro di Abidjan tahun 2017

Sebagai upaya lanjutan OKI dalam menyelesaikan konflik ini OKI mengadakan sidang guna menetapkan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik. Sidang ini merupakan sidang rancangan deputi luar negeri OKI yang mana dalam sidang ini menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik perwakilan dari pemerintah Filipina dan perwakilan dari Bangsamoro. Pada sidang yang diadakan di Abidjan, Pantai Gading 10-11 Juli 2017 Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Youssef Al Othaimen, menyambut baik posisi kooperatif dan akomodatif yang dinyatakan oleh Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) bahwa ia tidak akan lagi mengajukan rancangan undang-undang otonomi baru untuk menghindari komplikasi dan akan berkontribusi secara langsung, untuk federalisme di selatan Filipina.

Di sisi lain, untuk mendukung proses perdamaian, Sekretaris Jenderal OKI menyelenggarakan Sidang ke-4 Forum Koordinasi Bangsamoro (BCF) pada tanggal 11 Juli 2017 di Abidjan, Pantai Gading pada margin Sesi ke-44 Dewan Menteri Luar Negeri (CFM). Duta Besar Sayed El-Masry, Sekjen OKI, Peace Envoy di Filipina selatan memimpin pertemuan, dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) diwakili. OKI terus berurusan dengan MNLF melalui formula Jeddah di bawah kepemimpinan Profesor Nur Misuari, bapak pendiri MNLF

Agenda pertemuan membahas prospek proses perdamaian setelah satu tahun pemerintahan Duterte dan pendekatan baru terhadap pertanyaan Bangsamoro; konvergensi dari dua jalur perdamaian tanpa mengorbankan komitmen dan kewajiban apa pun yang terkandung dalam semua perjanjian damai; prinsip-prinsip yang memandu perluasan BCF dan situasi saat ini di Marawi.

Pertemuan ini berkenalan dengan isi UU Dasar Bangsamoro yang baru, khususnya, pendekatannya mengenai tiga isu yang tersisa, yaitu wilayah, referendum dan pembagian mineral

Pertemuan mencatat khususnya bahwa klausul di proposal baru termasuk wilayah sebagaimana diatur dalam Perjanjian 1976 Tripoli dan Final Peace Agreement 1996, dan selanjutnya menyambut adopsi dari klausul yang disepakati selama sidang Tripartit.

Penyelenggaraan pertemuan BCF adalah bagian dari upaya OKI untuk merapatkan barisan antara front pembebasan Moro dan untuk membantu dalam proses menggabungkan dua jalur perdamaian dan untuk mengkonsolidasikan realisasi hak-hak minoritas Muslim yang tidak dapat dicabut di selatan. Filipina untuk penyelesaian masalah mereka yang damai, adil dan tahan lama.

Menteri Luar Negeri OKI, menegaskan kembali pentingnya persatuan dalam MNLF dan formula Jeddah yang tercermin dalam resolusi yang diadopsi selama Sesi Menteri. Atas undangan dari Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam, dan dalam pelaksanaan resolusi dari Dewan Menteri Luar Negeri OKI mengenai pertanyaan kaum Muslim di Filipina Selatan, sebuah Sesi Konsultasi dari Forum Koordinasi Bangsamoro (BCF) diadakan di Markas Besar OKI di Jeddah pada 8 Mei 2017. Duta Besar Sayed El-Masry, Sekjen OKI Perdamaian untuk Filipina Selatan, memimpin pertemuan. Undangan dikeluarkan sesuai dengan formula yang disepakati yang dikenal sebagai formula Jeddah.

BCF didirikan oleh OKI pada tanggal 18 Mei 2010 setelah mendapatkan persetujuan dari kedua profesor NurMisuari, Ketua Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Hajj Murad Ibrahim, Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF) untuk membangun mekanisme untuk koordinasi antara dua front untuk mengkonsolidasikan gerakan mereka ke arah mencapai aspirasi rakyat Bangsamoro untuk resolusi damai yang adil dan abadi terhadap masalah mereka.

Dewan Menteri Luar Negeri OKI (CFM) meminta BCF untuk membahas cara dan sarana untuk menemukan kesamaan antara Perjanjian Perdamaian Tripoli 1976, Perjanjian Damai Jakarta 1996 dan Perjanjian Komprehensif

Bangsamoro (CAB) untuk menyelaraskan dua jalur perdamaian dan mempertahankan keuntungan yang terkandung dalam perjanjian ini yang MNLF dan MILF saling kenal dan hormati. Perlu diingat bahwa OKI selalu menyatakan bahwa Perjanjian Tripoli 1976 dan Perjanjian Jakarta 1996 terus merumuskan dasar bagi penyelesaian konflik.

Ini telah menjadi kebutuhan mendesak saat ini untuk merumuskan proposal yang tepat untuk mencapai tujuan ini mengingat prakarsa-prakarsa baru dari pemerintahan Filipina saat ini untuk menemukan solusi utama terhadap masalah inkonstitusionalitas yang telah menghadapi perjanjian damai selama empat puluh tahun terakhir.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta saling bertukar pandangan tentang perkembangan terakhir, khususnya, mengenai kerja Dewan Transisi Bangsamoro (BTC) yang dipercayakan dengan menyusun undang-undang dasar untuk daerah otonom. Pertemuan tersebut mengambil sikap yang kuat terhadap upaya apa pun untuk menghasilkan versi rancangan undang-undang yang dilemahkan selama tinjauan kongres.

Pertemuan tersebut juga membahas perluasan BCF untuk memasukkan pemangku kepentingan lainnya termasuk organisasi masyarakat sipil Bangsamoro dan kualifikasi untuk keanggotaan. Pertemuan tersebut

memutuskan untuk mengadopsi pendekatan inkremental dan inklusif terhadap pertanyaan memperkuat dan memperbesar BCF.

Anggota BCF menyambut janji Presiden Duterte dari Filipina untuk mencabut surat perintah penangkapan terhadap ketua Misuari dan mengembalikan kebebasannya. Utusan Khusus OKI untuk Proses Perdamaian di Filipina Selatan dan Ketua BCF, Amb Sayed El-Masry menyatakan bahwa “OKI selalu menyatakan bahwa Ketua Misuari sangat diperlukan untuk proses perdamaian menambahkan bahwa kami diyakinkan oleh Otorita Filipina bahwa mereka akan bekerja untuk menghilangkan hambatan apa pun atas partisipasinya dalam proses perdamaian.” Dia menyatakan harapan bahwa dia akan dapat menghadiri sesi formal berikutnya dari BCF di Abidjan pada margin pertemuan CFM dari tanggal 10 - 11 Juli 2017 puncak dari segala pertemuan yang dilakukan OKI di tahun 2017 adalah sidang di Abidjan, Pantai Gading ini dilaksanakan pada tanggal 10-11 Juli 2017 yang mana sidang itu tidak hanya dihadiri oleh pihak yang berkonflik tetapi tetap ada tinjauan dari pihak lain seperti Arab Saudi dan Indonesia. .

Sidang di Abidjan berlangsung lancar dimana dari sidang itu lahir beberapa gagasan

1. OKI menekankan kepada kedua belah pihak untuk menghormati perjanjian Tripoli 1976 dan Final Peace Agreement sebagai dasar resolusi konflik

yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni antara pemerintah Filipina itu sendiri dan pihak MNLF

2. Menegaskan kembali bahwa Comprehensive Agreement (CBA) Bangsamoro juga merupakan pemenuhan persyaratan mewujudkan perdamaian di Mindanao, dan juga merupakan langkah besar untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Mindanao
3. OKI menyambut inisiatif pemerintah untuk mencari solusi unkonstitusional yang telah dihadapi dalam upaya mencapai perdamaian selama kurun waktu 40 tahun ini.
4. OKI menyarankan bahwa dasar hukum Bangsamoro di sahkan dibawah hukum pemerintah Filipina dan Bangsa Moro diberi otonom sendiri.
5. OKI menyatakan bahwa pemerintah harus bekerjasama dengan MILF dan MNLF untuk mengadopsi segala kebaikan yang ada di perjanjian Tripoli 1978 dan Final Peace Agreement guna membentuk otonom Bangsamoro.

Sidang ini mendapatka hasil yang positif pihak luar juga banyak yang mendukung perdamaian tercipta di selatan Filipina. Karena konflik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini tidak selesai-selesai, jika tidak cepat selesai konflik ini hanya akan selalu memakan korban dan ,menjadi sorotan dunia Internasional

Para anggota BCF mengucapkan terima kasih kepada OKI dan sekjen PBB atas dukungannya yang

berkelanjutan, dan menegaskan kembali janji mereka bahwa mereka terus bekerja sama dengan OKI dan di antara mereka sendiri untuk memenuhi aspirasi rakyat Bangsamoro.